

**PERSEPSI *STAKEHOLDERS* TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**
(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh Derajat S-2 Magister Akuntansi



Diajukan oleh :

Nama : Sutedjo
NIM : C4C007052

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2009**

Tesis berjudul

**PERSEPSI *STAKEHOLDERS* TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**
(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sutedjo

NIM C4C007052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Januari 2010
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Anis Chariri,SE.Mcom.PhD,Akt

Dr.Jaka Isgiyarta,Msi,Akt

Anggota Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr.Abdul Rohman,Msi,Akt

Dra.Zulaikha,Msi,Akt

Penguji III

Drs.Daljono,Msi,Akt

Semarang, 12 Januari 2010
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Akuntansi
Ketua Program

Dr.Abdul Rohman,Msi,Akt

Tesis Berjudul

**PERSEPSI *STAKEHOLDERS* TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH**

(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)



Nama : Sutedjo

NIM : C4C007052

Disetujui Oleh Pembimbing

Ketua : Anis Chariri,SE.M.Com.PhD

Anggota : DR.Jaka Isgiyarta,SE.MSi.Ak

Tanggal :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan Judul “Persepsi *Stakeholders* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah” (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal) yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, serta sepanjang pengetahuan saya dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang diacu dalam naskah ini secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Nopember 2009

Sutedjo

C4C007052

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

1. “...Maka bertanyalah kepada ahli pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya”
(Q.S: An Nahl: 41)
2. “ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia
Yang lain”

PERSEMBAHAN

Buat anak-anak dan istriku tercinta

Almamaterku

ABSTRACT

This research aims to analyze the differences in perception between internal and external stockholders toward the transparency of school's financial management and to analyze the differences in perception between internal and external stockholders on the accountability of school's financial management. Population of the research is all teachers, staff, and school committee management and those become a research objects are SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, SMP Negeri 1 Weleri Kendal, SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal and SMP Negeri 1 Boja Kendal, and also those APBS researchers from Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Members of Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal and Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) which operates or cares about an education issue. A sampling technique which used is a probability sampling.

An analysis technique within the research includes Validity Test is a rate for which a measurer can gauges what have to be measured, so that a research using questionnaire as a measurer the validity need to be examined. Reliability test is performed to gauge a construct consistency or research variable. A questionnaire said reliable if one's response toward the statement is consistent or stable over time. Data normality test is done to recognize whether data is distributed normally. T-test aims to compare mean from the two groups unrelated to each other, whether the two groups have equal mean.

A statistic analysis of the research showed the following findings : 1) there is a mean difference in stockholder perception (both Internal and External) on a transparency of school financial management on National-standardized Junior High School of Kendal Regency, 2) there is a mean differences in stockholder perception (both Internal and Regional) on accountability of School's financial management on National-standardized Junior High School of Kendal Regency.

Keywords: Stockholder perception, Transparency, Accountability, School's Financial Management

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah dan untuk menganalisis perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru, karyawan, pengurus komite sekolah di sekolah yang menjadi obyek penelitian yaitu SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, SMP Negeri 1 Weleri Kendal, SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal dan SMP Negeri 1 Boja Kendal, juga peneliti APBS dari Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak atau peduli dengan bidang pendidikan.

Teknik analisis dalam penelitian meliputi Uji validitas adalah suatu taraf di mana alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga suatu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengukurnya perlu diuji validitasnya. Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji t bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atukah tidak secara signifikan.

Analisis statistik yang dilakukan menunjukkan penemuan :1) Adanya perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* (Internal dan Eksternal) terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal, 2). Adanya perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* (Internal dan Eksternal) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal.

Kata Kunci : Persepsi *Stakeholder*, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Sekolah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Persepsi *Stakeholders* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah” (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional di Kabupaten Kendal) sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi pada Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak terkait, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan sampai penyelesaian tugas akhir (Tesis) berdasarkan DIPA Sekretariat Jendral Depdiknas Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009
2. DR.Abdul Rohman,,M.Si,Akt dan Anis Chariri,SE.M.Com.PhD.Ak serta Dra.Zulaikha,MSi,Ak selaku Pengelola Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI)
3. Anis Chariri,SE.M.Com.PhD.Ak dan DR.Jaka Isgiyarta,SE.MSi.Akt, selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan ketekunan kesabaran dan keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan dukungan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu pada Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama penulis menempuh studi
5. Staf Administrasi pengelola Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang sangat membantu penulis dalam memperlancar urusan administrasi sehingga studi penulis bisa berjalan lancar

6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
7. Teman seperjuangan di Kelas C Beasiswa Unggulan yang dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaannya telah saling memberikan dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
8. Kepala SMP 1 Boja, SMP 1 Sukorejo, SMP 1 Weleri, SMP 1 Kendal, dan SMP 2 Kendal beserta seluruh stakeholdernya yang telah membantu kelancaran penulis dalam pengambilan data penelitian
9. Bapakku tercinta Karwidi, Istriku tercinta Nurwati dan anak-anakku tersayang Indra, Andi dan Tyas serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan semangat yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan studi
10. Sahabat terkasih yang senantiasa hadir dan memberikan support baik dalam suka dan duka kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sampai tugas akhir studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian dan menyusun tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi peningkatan kemampuan penulis di masa yang akan datang

Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di bidang transparansi dan akuntabilitas. Amin..

Penulis

Sutedjo
C4C007052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Telaah Teori	11
2.1.1. Good Governance	11
2.1.2. Persepsi	13
2.1.3. Pengelolaan keuangan sekolah.....	17
2.1.4. Transparansi	30
2.1.5. Akuntabilitas	34
2.2. Telaah Penelitian Sebelumnya	40
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Disain Penelitian	45
3.2. Populasi, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3. Variabel Penelitian dan Divinisi Operasional Variabel	49
3.4. Instrumen Penelitian	51
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
3.6. Prosedur Pengumpulan Data	53
3.7. Teknik Analisis	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional	58
4.2. Gambaran Umum Responden	62
4.3. Uji Kualitas Data	67
4.4. Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional ...	79
4.5. Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional ...	80
4.6. Uji t	82
4.7. Pembahasan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Kesimpulan dan Implikasi	92
5.2. Keterbatasan dan Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Telaah Penelitian Sebelumnya	40
Tabel 3.1 : Daftar Populasi	46
Tabel 3.2 : Perhitungan Jumlah Sampel	48
Tabel 3.3 : Jadwal Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	54
Tabel 4.1 : Data Daftar siswa 3 Tahun Terakhir	59
Tabel 4.2.: Data Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59
Tabel 4.3 : Ijasah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	60
Tabel 4.4 : Anggaran Pedapatan dan Belanja Sekolah	61
Tabel 4.5 : Data Nilai Prestasi Akademik.....	61
Tabel 4.6 : Data Pendidikan Responden	62
Tabel 4.7 : Data Usia Responden.....	63
Tabel 4.8 : Data Jenis Kelamin Responden	64
Tabel 4.9 : Persepsi Stakeholder Internal dan eksternal	65
Tabel 4.10 : Persepsi Stakeholder internal dan eksternal	66
Tabel 4.11 : Hasil Uji Validitas Persepsi Stakeholder Tentang Transparansi.....	68
Tabel 4.12: Hasil Uji Validitas Persepsi Stakeholder Tentang Akuntabilitas	69
Tabel 4.13: Uji Reliabilitas Persepsi Stakeholder Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas	70
Tabel 4.14: Uji Normalitas Data Aspek Variabel Transparansi	71
Tabel 4.15: Hasil Uji Statistik Perbedaan Persepsi Responden tentang Transparansi	73
Tabel 4.16 : Uji Normalitas Data Aspek Variabel Akuntabilitas.....	74
Tabel 4.17 : Hasil Uji Statistik Perbedaan Persepsi Responden tentang Akuntabilitas	76
Tabel 4.18: Uji Normalitas Data	78
Tabel 4.19 : Rata-rata Nilai Stakeholder Internal dan Eksternal tentang Transparansi	79
Tabel 4.20: Rata-rata Nilai Stakeholder Internal dan Eksternal tentang Akuntabilitas	80

Tabel 4.21 : Uji perbedaan Rata-rata Stakeholder Internal dan Eksternal tentang Transparansi	82
Tabel 4.22 : Uji Perbedaan Rata-rata Stakeholder Internal dan Eksternal tentang Akuntabilitas	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Penelitian	43
Gambar 4.1 : Posisi Rata-rata Variabel Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Transparansi	80
Gambar 4.2 : Posisi Rata-rata Variabel Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Akuntabilitas	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	98
Lampiran 2 : Ijin Penelitian	106
Lampiran 3 : Hasil Uji Statistik dengan Program SPSS	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan maraknya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi di era Orde Baru telah melahirkan reformasi sekaligus menggantikan sistem pemerintahan yang sentralistis dengan otonomi daerah yang sangat luas (*desentralistis*). Hal ini ditandai dengan diberlakukannya paket kebijakan otonomi daerah yaitu lahirnya UU Nomor 22 / 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 / 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Di era demokratisasi dan otonomi daerah saat ini sangat diperlukan adanya tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, dimana kata “baik“ yang dimaksudkan disini adalah tata pemerintahan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* (Haryanto 2007). World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi

dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Pada Bab III Pasal 3 UU tersebut disebutkan asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas.

Adapun menurut penjelasan UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Menurut Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 1999, dinyatakan bahwa tujuan pedoman adalah sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan/daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional mengacu pada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pendanaan tidak diatur secara khusus. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tersebut Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan.

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah itu dibelanjakan.

Selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa, sehingga pemerintah maupun *stakeholders* dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunnya (Bastian 2007).

Dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada Komite Sekolah dan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian 2007).

Bastian (2007) juga mengatakan bahwa dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber

keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif.

Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tentang bagaimana keuangan sekolah dikelola, menurut Bastian (2007) masih ditemukan adanya hal-hal antara lain :

- 1). Dalam proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah belum melibatkan *stakeholders*, sehingga masih terjadi pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas, sifat dan kebutuhan siswa.
- 2). Makin mahalnya pungutan pada masyarakat oleh sekolah negeri, sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan menengah yang baik semakin tertutup.
- 3). Komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah.
- 4). Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan entitas sekolah.
- 5). Kuatnya dominasi Kepala Sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah, menyebabkan rendahnya keinginan Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan keuangan sekolah dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sekolah

- 6). Masih adanya berbagai macam persepsi diantara *stakeholders* tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diketahui peneliti sebagian besar meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana penelitian untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah khususnya di Kabupaten Kendal belum pernah dilakukan.

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan manajer BOS Kabupaten Kendal Drs. Bambang Tejo Waluyo,MPd tanggal 20 September 2009 tentang pengelolaan keuangan sekolah khususnya masalah transparansi dan akuntabilitasnya dikatakan bahwa masih ditemukan adanya sekolah yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah khususnya dana BOS, sehingga masalah transparansi dan akuntabilitas masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana hal ini bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda diantara *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

Stakeholders internal yang dimaksud disini adalah pemangku kepentingan yang berada di sekolah yang terdiri guru, karyawan dan komite sekolah yang merupakan representasi atau wakil orang tua/wali murid. Dimana *stakeholder* internal ini secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan sekolah, sehingga sudah barang tentu mereka bisa mempunyai persepsi yang positif dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Sedangkan *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah pemangku kepentingan yang berada di luar sekolah yang terdiri pemeriksa APBS Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) peduli pendidikan. Sekalipun *stakeholder* eksternal terdiri dari pemeriksa APBS, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan secara umum mereka memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sekolah karena mereka terdiri dari mantan guru, kepala sekolah sehingga mereka cukup memahami isi instrumen yang harus diisi.

Stakeholder eksternal mewakili kepentingan publik untuk mengetahui tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, namun karena *stakeholders* eksternal tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan sekolah kemungkinan mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dibanding *stakeholders* internal.

Selama ini yang terjadi di sekolah antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terkadang memiliki perbedaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan sekolah khususnya tentang transparansi dan akuntabilitasnya, padahal seharusnya tidak ada perbedaan persepsi tersebut kalau sekolah benar-benar telah melakukan pengelolaan keuangannya dengan transparan dan akuntabel.

Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah khususnya persepsi *stakeholder* internal dan eksternal, apakah terhadap pengelolaan keuangan sekolah benar-benar terjadi perbedaan persepsi diantara *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal atau sudah ada kesamaan persepsi.

1.2. Rumusan Masalah

Kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi tentang pengelolaan keuangan sekolah antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal bisa disebabkan karena

informasi yang diterima antara kedua *stakeholder* tersebut dalam hal pengelolaan keuangan sekolah tidak sama, di satu sisi *stakeholder* internal sangat mengetahui banyak tentang pengelolaan keuangan sekolah namun pada sisi yang lain *stakeholder* eksternal tidak banyak mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus/masalah utama dalam penelitian ini adalah masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, namun karena luasnya ruang lingkup masalah utama maka peneliti membatasi hanya masalah persepsi *stakeholder*, sehingga rumusan masalah yang akan diketahui dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah
2. Adakah perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah
2. Untuk menganalisis perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah
- b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah

2. Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Telaah Teori yang meliputi *Good Governance* , Persepsi, Pengelolaan keuangan sekolah, Transparansi, Akuntabilitas selanjutnya Telaah Penelitian sebelumnya, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian. BAB III Metode Penelitian terdiri dari : Disain Penelitian, Populasi dan Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Lokasi dan

Waktu Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis. BAB IV terdiri dari : Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, Gambaran Umum Responden, Uji Kualitas Data, Persepsi *Stakeholder* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, Persepsi *Stakeholder* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, Uji t dan Pembahasan. BAB V Kesimpulan Dan Saran yang terdiri : Kesimpulan dan Implikasi, Keterbatasan dan Saran, Selanjutnya Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Teori

2.1.1. *Good Governance*

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Krina 2003). Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain (Meuthia 2000).

World Bank mengartikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Haryanto 2007).

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Haryanto (2007), tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina 2003)¹

Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (Mardiasmo 2002) meliputi :

- 1) *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.
- 2) *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*, yaitu kebebasan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4) *Responsiveness*, yaitu kecepatan dan daya tanggap lembaga publik dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.
- 5) *Consensus Orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- 6) *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and Effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 8) *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.
- 9) *Strategicvision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari karakteristik tersebut di atas, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). Sedangkan menurut *United Kingdom Overseas Development Administration* (UKODA) dalam Haryanto (2007) dijelaskan adanya empat karakteristik *Good Governance* yaitu legitimasi, akuntabilitas, kompetensi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Menurut perspektif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam “*Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi*” MTI, Jakarta, Mei 2000 (Haryanto 2007) bahwa *Good Governance* mensyaratkan 4 (empat) asas yaitu :

- 1) Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.
- 2) Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.
- 3) Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan.
- 4) Kestinambungan, bermakna bahwa pembangunan harus memperhatikan kestinambungan generasi berikutnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* perlu adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

2.1.2. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi meliputi penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus dan penafsiran stimulus serta diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap (Gibson 1987). Sedangkan menurut Siegel (1989) persepsi diartikan sebagai proses dimana individu

menyeleksi, mengorganisir, dan menginterpretasikan rangsang ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia.

Menurut Irwanto (1997) persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsang disadari atau diterima. Masih menurut Irwanto (1997) persepsi sosial adalah kesadaran individu akan adanya orang lain atau perilaku orang lain yang terjadi di sekitarnya, oleh karena itu persepsi bukan sekedar penginderaan tetapi sebagai *interpretation of experience* atau penafsir pengalaman. Lebih lanjut Irwanto (1997) mengemukakan bahwa persepsi dapat juga diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu obyek.

Sedangkan menurut Kotler (2000) mengartikan persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka (Robbins 2006). Persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Menurut pendapat Robbins (2006) perbedaan individu dalam memandang satu benda yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) pelaku persepsi, yang meliputi : sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan, 2) obyek atau target yang dipersepsikan yang meliputi : hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan 3) situasi dimana persepsi itu dibuat, yang meliputi : waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.

Menurut teori atribusi dalam Robbins (2006) dikatakan bahwa ketika individu-individu mengamati perilaku, mereka berupaya menentukan apakah

perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini mengembangkan penjelasan tentang cara menilai orang secara berlainan tergantung pada makna apa yang dikaitkan dengan perilaku tersebut.

Adapun faktor penentu dalam teori atribusi ada tiga yaitu : 1) keunikan, yaitu apakah individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan, 2) konsensus, yaitu apabila seseorang dihadapkan dalam situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama, 3) konsistensi yaitu apakah seseorang memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Walgito (1991) menyatakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu.

Faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito (1991) adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf, serta perhatian. Perhatian sebagai suatu syarat adanya suatu persepsi merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa perhatian tidak terjadi persepsi. Berdasarkan atas penyelidikan-penyelidikan menunjukkan bahwa perhatian ada bermacam-macam sesuai dari segi mana perhatian itu akan ditinjau.

Menurut pendapat Walgito (1991) perhatian terdiri atas beberapa macam, antara lain :

- 1). Ditinjau dari segi timbulnya perhatian : a) Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya, timbul dengan cara spontan, perhatian ini erat dengan minat individu. b) Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya, sebagai contoh seorang murid untuk dapat mengikuti pelajaran dengan sengaja harus ditimbulkan perhatiannya.

- 2). Dilihat dari banyaknya objek : a) Perhatian yang sempit yaitu perhatian individu pada suatu waktu hanya dapat memperhatikan sedikit objek. b) Perhatian yang luas, yaitu individu pada suatu waktu dapat memperhatikan banyak objek pada suatu saat sekaligus.
- 3). Dilihat dari fluktuasi perhatian : a) Perhatian statis yaitu individu dalam waktu tertentu dapat tetap perhatiannya pada objek tertentu. b) Perhatian yang dinamis yaitu individu dapat memindahkan perhatiannya secara lincah dari satu objek ke obyek lain.

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana ia memandang suatu objek dengan melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Sesuai dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembentukan persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengamatan, penginderaan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Sehingga persepsi merupakan proses transaksi penilaian terhadap suatu obyek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan pengalaman masa lampau, sikap, harapan dan nilai yang ada pada diri individu.

Dengan demikian, persepsi adalah interpretasi seseorang terhadap fakta yang ditangkap oleh inderanya, berdasarkan apa yang diketahui dan dirasakannya, yang dapat dipengaruhi oleh sikap dan perilakunya. Persepsi bersifat individual sehingga masing-masing individu mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu obyek yang sama.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek persepsi adalah laporan pengelolaan keuangan sekolah, dimana baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal

memberikan persepsinya tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan informasi yang diterima mengenai pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka persepsi *stakeholder* terhadap laporan pengelolaan keuangan sekolah adalah suatu aktivitas mental *stakeholder* dalam proses pengorganisasian dan penerjemahan kesan-kesan, penilaian, dan pendapat dalam merasakan serta menginterpretasikan laporan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan informasi yang ditampilkan sekolah. Persepsi *stakeholder* terhadap laporan pengelolaan keuangan sekolah itu bisa berbeda untuk masing-masing *stakeholder* namun bisa juga sama sesuai dengan hasil pengalaman, latar belakang pendidikan, dan karakter psikologi *stakeholder* tersebut.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Sekolah

2.1.3.1. Otonomi Daerah

Reformasi disegala bidang yang didukung oleh masyarakat dalam mensikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Negara Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang - Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan

pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu otonomi daerah diharapkan dapat : (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo 2002).

Di era otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital, karena di sanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila bupati/walikota tidak mengetahui bagaimana mengelolanya.

Sebaliknya meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategi yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan

daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dana terutama alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.

Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* (Mardiasmo 2002).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya (Haryanto 2007). Selain untuk mendukung reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya *new public management* yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan.

Penggunaan paradigma *new public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya perubahan pendekatan dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan untuk melakukan

efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (*compulsory competitive tenderingcontract*) (Haryanto2007).

Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dimana sebagian dari kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah (Haryanto 2007).

2.1.3.2.Keuangan Sekolah

Pendidikan adalah salah satu bidang yang didesentralisasikan pengelolaannya kepada daerah, sehingga kepala sekolah selaku pengendali manajemen pengelolaan keuangan pendidikan/sekolah harus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidanginya.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Suryana 2008).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain.

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini (Mulyasa 2007).

Menurut Suryana (2008) bahwa sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai

(guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Suryana 2008).

2.1.3.2. Komponen utama manajemen keuangan Sekolah

Pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban (Suryana 2008).

Kepala sekolah dalam hal ini sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan

pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Adapun komponen manajemen keuangan meliputi : (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan, (3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian, (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan (Suryana 2008)

2.1.3.3. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah menurut Suryana (2008) adalah :

- 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- 2). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- 3). Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Disamping itu sekolah sebagai organisasi nirlaba/non bisnis dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekolah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan laporan keuangan yang dirumuskan oleh *Financial Accounting Standarts Board* (FASB,1980) yang telah mengeluarkan *Statement Of Financial Accounting Concepts* No.4 (SFAC 4) sebagai berikut : (Mardiasmo 2002)

- 1). Laporan keuangan organisasi non bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

- 2). Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumberdaya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
- 3). Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- 4). Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi , serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kepentingan sumberdaya tersebut.
- 5). Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- 6). Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumberdaya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
- 7). Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai

dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan menurut Suryana (2008) sebagai berikut:

- 1). Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- 2). Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
- 3). Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.
- 4). Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan

2.1.3.5. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Implementasi prinsip-prinsip keuangan di atas pada pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya memperoleh anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dari ketiga komponen di atas.

Untuk itu di sekolah sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah. Komite

tersebut beranggotakan wakil orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ulama di luar sekolah dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri (Permendiknas No.44 Tahun 2003).

Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik.

2.1.3.6. Pengertian RAPBS

Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka seorang penanggungjawab program kegiatan di sekolah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

Masih menurut Suryana (2008), ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, yaitu:

- 1). Rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk di dalamnya keuangan bersumber dari:
 - a) kontribusi orang tua siswa,
 - b) sumbangan dari individu atau organisasi,
 - c) sumbangan dari pemerintah,
 - d) dari hasil usaha

- 2). Rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik pula.

2.1.3.7. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS

Dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menurut Suryana (2008) adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan.
- 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya.
- 3) Menentukan program kerja dan rincian program.
- 4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.
- 5) Menghitung dana yang dibutuhkan.
- 6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang

akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, menurut Suryana (2008) paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi rencana kegiatan : sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggungjawab, rencana baru atau lanjutan.
- 2) Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program.
- 3) Informasi kebutuhan : barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan.
- 4) Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan.
- 5) Jumlah anggaran : jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan.
- 6) Sumber dana : total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.

2.1.3.8. Realisasi APBS

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab :

- 1). Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
- 2). Terjadinya penghematan atau pemborosan
- 3). Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
- 4). Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi.
- 5). Penyusunan anggaran yang kurang tepat (Suryana 2008)

2.1.3.9. Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008) adalah:

- 1). Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
- 2). Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada.
- 3). Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain.
- 4). Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

2.1.4. Transparansi

2.1.4.1. Pengertian

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah

perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat (Surya Darma 2007).

Sekolah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Sekolah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Menurut Surya Darma (2007) transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah (Surya Darma 2007). Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah (Surya Darma 2007).

Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah (Hamid Muhammad, 2007), dimana data yang dilaporkan sekolah mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

2.1.4.2. Tujuan Transparansi

Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Hamid Muhammad 2007)

2.1.4.3. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi

Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik menurut Hamid Muhammad (2007) antara lain :

- 1). Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.
- 2). Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.
- 3). Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.
- 4). Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

2.1.4.4. Indikator keberhasilan Transparansi

Masih menurut Hamid Muhammad (2007) bahwa keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa.
- 2). Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.
- 3). Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah dan.
- 4). Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. Akuntabilitas

2.1.5.1. Pengertian

Secara harafiah, konsep akuntabilitas atau *accountability* berasal dari dua kata yaitu *account* yang artinya rekening, laporan, catatan dan *ability* yang artinya kemampuan. Dengan demikian *accountability* dapat diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Suharto 2005). Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat.

Menurut Hamid Muhammad (2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara menurut pendapat Zamroni (2000) akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi, ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari *stakeholders* sekolah. Semakin kecil partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Headington dalam Zamroni (2000) berpendapat bahwa "*Accountability has moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of the education system.*" Ketiga dimensi yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu moral, hukum, dan keuangan menuntut tanggung jawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus dimulai bagi warga sekolah itu sendiri.

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahnya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas.

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas menurut Surya Darma (2007) yaitu :

- (1) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- (2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

2.1.5.2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Mardiasmo (2004) menyatakan: tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya.

Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa, akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

2.1.5.3. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban

kepada dinas pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru (Haryanto,2007).

Pengelola sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan sekolah kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output.

Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Haryanto, 2007). Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan masyarakat.

Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu. Jadi moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek korupsi.

Fakta yang menyangkut praktek korupsi dalam dunia pendidikan bukan hal baru. Temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) awal tahun 2008 bahwa, korupsi dalam dunia pendidikan telah menjamah, mulai dari Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan, sampai di sekolah-sekolah. Kenyataan ini sangat ironis, karena berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya diajarkan lembaga pendidikan kepada anak bangsa, tidak saja dari segi intelektual tetapi juga moral. Informasi ini merupakan "tamparan" keras bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu dalam rangka

penerapan MBS ini, pengelolaan keuangan sekolah harus jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki tingkat efektivitas output tinggi. Sekolah yang memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal.

Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik (Mardiasmo 2004) :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.
- 2) Akuntabilitas proses.
- 3) Akuntabilitas program dan
- 4) Akuntabilitas kebijakan.

2.1.5.4. Upaya-upaya Peningkatan Akuntabilitas

Menurut Hamid Muhammad (2007) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas :

- 1). Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2). Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3). Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun anggaran.

- 4). Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*.
- 5). Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun.
- 6). Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7). Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8). Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Sekolah harus mengetahui sumber dayanya, sehingga dapat digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas.

Sekolah dapat melibatkan *stakeholders* untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu *stakeholders* sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.

2.1.5.5. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa indikator, sebagaimana dinyatakan oleh Hamid Muhammad (2005) sebagai berikut :

- 1).Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
- 2).Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3).Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

4).Berkurangnya kasus-kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di sekolah.

Keempat indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.

2.2. Telaah Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini seperti tertuang dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.1

TELAAH PENELITIAN SEBELUMNYA

No	Peneliti	Topik Penelitian	Teknik Analisa	Kesimpulan
1.	Safwirdi (2005)	Tentang : Analisis Pelaporan keuangan sektor Publik Untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas Publik Dan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemda Tk II Propinsi DIY)	Statistik uji t, uji beda rata-rata , Analisis Perbandingan dan Uji Mean	Secara umum Pengelolaan Keuangan akuntabel dan transparan. Menunjukkan adanya perbedaan antara informasi yang disampaikan pihak eksekutif dengan kebutuhan informasi pihak auditor
2.	Jumirin	Tentang :	Independen	Tidak ada perbedaan

	Asikin (2001)	Persepsi Kepala Instansi Pemerintahan Terhadap Otonomi Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja di DIY dan Jawa Tengah	sampel t-test dan Mean-U Whitney test	yang signifikan persepsi antara kepala dinas dengan kepala kantor terhadap otonomi daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah
3.	Bawuk Puji Santoso (2005)	Tentang : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembayaran, Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Banyumas.	Statistik Uji-t dan analisis Spearman	Secara umum pengelolaan keuangan oleh sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan Tidak ada perbedaan antara sekolah yang efisien dan inefisien dalam hal : tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, akuntabilitas, dan transparansi

Sumber : Data primer diolah 2009

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan di Indonesia memang sudah banyak dilakukan, namun demikian penelitian mengenai persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, khususnya di Kabupaten Kendal sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan.

Dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di atas, peneliti melakukan replikasi dari landasan teori dan metode analisis yang digunakan.

Kemudian peneliti memodifikasi metodologi penelitiannya disesuaikan dengan topik penelitian penulis. Hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Ada beberapa macam *stakeholders* yang menjadi objek penelitian meliputi : Guru, karyawan, pengurus Komite sekolah, pemeriksa APBS Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal, dan LSM yang peduli pendidikan di Kabupaten Kendal.

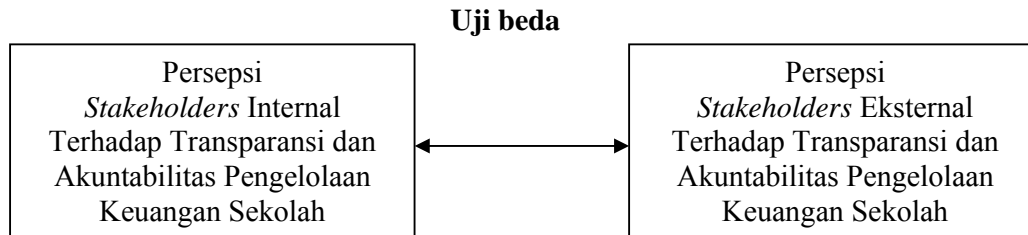
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Kerangka pemikiran Teoritis

Masyarakat menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh obyek stimulus yang diterima meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, karena dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana sekolah itu dibelanjakan.

Persepsi publik/masyarakat selaku *stakeholder* baik internal maupun eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah bisa sama dan bisa berbeda, tergantung stimulus yang diterima, hal inilah yang akan diuji dalam penelitian ini sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini :

GAMBAR 2.1
SKEMA KERANGKA PENELITIAN



2.3.2. Pengembangan Hipotesis

Keterbukaan atau transparansi sekolah dalam pengelolaan keuangannya merupakan satu hal yang tidak bisa diabaikan lagi, mengingat tanpa adanya keterbukaan akan menimbulkan perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan atau *stakeholder* baik internal maupun eksternal, demikian halnya dengan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, karena sebesar apapun dan dari sumber manapun dana yang diterima oleh sekolah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemberi bantuan.

Perbedaan maupun persamaan persepsi *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terhadap tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah sangat tergantung kepada informasi yang diterima oleh *stakeholder* tersebut, juga berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, latar belakang pendidikan dan karakter psikologi yang bersangkutan.

Berdasarkan pada kajian pada latar belakang masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan persepsi *stakeholders* terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah (Ha1).

2. Terdapat perbedaan persepsi *stakeholders* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah (Ha 2).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan disain penelitian deskriptif kuantitatif atau jenis penelitian lapangan dengan maksud untuk menguji hipotesis yaitu mengungkap situasi atau variabel sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Dalam penelitian ini variabel penelitian tidak dimanipulasi atau dikenai perlakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (1988) bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.

3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi

Penelitian ini menggunakan populasi semua guru, karyawan, pengurus komite sekolah di sekolah yang menjadi obyek penelitian yaitu SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, SMP Negeri 1 Weleri Kendal, SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal dan SMP Negeri 1 Boja Kendal, juga pemeriksa APBS dari Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak atau peduli dengan bidang pendidikan dengan jumlah sebagai berikut 45

TABEL 3.1
DAFTAR POPULASI

No.	Stakeholder	Sekolah					Jumlah
		SMP 1 Boja	SMP 1 Weleri	SMP 1 Kendal	SMP 2 Kendal	SMP 1 Sukorejo	
1.	Guru	39	37	35	40	44	195
2.	Karyawan	14	13	12	12	14	65
3.	Komsek	11	9	11	5	9	45
Jumlah							305
4.	Pemeriksa APBS						11
5.	Dewan Pend						14
6.	LSM						10
Jumlah							35
Jumlah Total							340

Sumber : Data primer diolah 2009

Pemilihan populasi ini karena baik guru, karyawan maupun pengurus komite sekolah merupakan *stakeholders* internal sedangkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal, pemeriksa APBS dari dinas Dikpora Kabupaten Kendal maupun LSM peduli pendidikan merupakan *stakeholders* eksternal, dimana kedua *stakeholders* tersebut diharapkan dapat mewakili publik untuk memberikan persepsinya tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Populasi dipilih di Kabupaten Kendal karena berdasarkan laporan pengelolaan keuangan sekolah khususnya Dana Bantuan Operasional (BOS) dari sekolah ke manajer BOS Kabupaten Kendal, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.

3.2.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diharapkan dapat mewakili populasinya, hal ini dilakukan karena besarnya populasi yang harus diteliti dan keterbatasan waktu dalam

penelitian, namun demikian dengan teknik sampling yang digunakan hasilnya diharapkan dapat dipakai untuk menggeneralisasikan populasinya.

Adapun besar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan pada tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dalam Sugiyono (2008) dengan rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %,5%,10%

P = Q = 0,5. d = 0,05, s = jumlah populasi

Berdasarkan rumus di atas dan tabel penentuan sampel dari populasi yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dalam Sugiyono (2008), dengan jumlah populasi sebesar 340 dengan tingkat kesalahan 5% maka sampel dalam penelitian ini adalah 172.

Mengingat populasi dalam penelitian ini terdiri dari guru, karyawan, komite sekolah, pemeriksa APBS, Anggota Dewan Pendidikan dan Lemmbaga Swadaya Masyarakat dengan jumlah yang berbeda, maka agar jumlah sampel yang diambil proporsional sesuai populasi dilakukan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2

PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL

Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Dibulatkan
------------------	------------------------	----------------------	-------------------

Guru	$195 / 340 \times 172$	98,65	99
Karyawan	$65 / 340 \times 172$	32,88	33
Komite Sekolah	$45 / 340 \times 172$	22,76	23
Pemeriksa APBS	$11 / 340 \times 172$	5,56	6
Dewan Pendidikan	$15 / 340 \times 172$	7,58	8
LSM	$10 / 340 \times 172$	5,05	5
Jumlah			174

Sumber : Data primer diolah 2009

Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya = $99 + 33 + 23 + 6 + 8 + 5 = 174$

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono 2008), yang dilakukan dengan teknik *simple random sampling*.

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* karena anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan anggota populasi homogen. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Bungin (2004) bahwa teknik *random sampling* digunakan apabila populasi berasal dari anggota populasi yang homogen dan tiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil secara acak (*random*), kemudian hasil pengambilan secara acak tersebut dijadikan sampel penelitian.

Teknis pengambilan sampel dilakukan dengan cara setelah diketahui jumlah populasi dan jumlah sampel yang akan dipakai untuk setiap responden baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal sesuai dengan tabel 3.2 diatas, maka agar sampel yang digunakan benar-benar menggambarkan populasi yang ada proses penentuan sampel dilakukan dengan cara membuat undian sejumlah populasi yang ada setiap responden, selanjutnya dilakukan pengundian sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Penelitian

Stakeholder internal dalam penelitian ini terdiri dari guru , karyawan dan komite sekolah sedangkan *Stakeholders* eksternal dalam penelitian ini terdiri dari pemeriksa APBS Dinas Dikpora Kabupaten Kendal, Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal dan LSM peduli pendidikan. Kedua *Stakeholders* tersebut merupakan variabel yang akan memberikan persepsinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Meskipun *stakeholder* internal berada di sekolah dan *stakeholder* eksternal berada di luar sekolah apabila sekolah dalam mengelola keuangannya sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel tentunya baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal akan bisa memberikan persepsi yang sama terhadap pengelolaan keuangan sekolah, sebaliknya apabila sekolah dalam mengelola keuangannya ada indikasi tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang akan terjadi adalah adanya perbedaan persepsi antara *stakeholder* internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

3.3.2.1. Transparansi

Transparansi diartikan bahwa semua keputusan diambil secara terbuka dan berdasarkan fakta obyektif. Transparansi mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat dan cermat. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga *stakeholder* dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Menurut Hamid Muhammad (2007) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini pertanyaan/ Pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi berjumlah 23 pertanyaan/ Pernyataan.

3.3.2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Hamid Muhammad (2007) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat serta berkurangnya kasus-kasus

korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam penelitian pertanyaan/pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas berjumlah 11 pertanyaan/pernyataan.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa kuesioner penelitian yang terdiri dari 3 bagian : bagian pertama berupa surat permohonan sebagai responden yang dibuat oleh peneliti ditujukan kepada semua responden, bagian kedua berupa isian biodata yang harus diisi oleh responden dan bagian ketiga berupa pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden dimana responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Skala Likert 4 (interval 4), hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2008) yaitu pada skala Likert terdapat 3,4,5,6,7 interval, dari kata "sangat setuju" sampai " sangat tidak setuju". (contoh kuesioner terlampir), dengan likert 4 peneliti ingin responden memberikan persepsinya secara jelas atau pasti tidak ada keraguan.

Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah 34 pertanyaan dimana setiap pertanyaan telah disediakan 4 pilihan jawaban yaitu a) sangat setuju (ST) dengan skor 4, b) setuju (S) dengan skor 3, c) tidak setuju (TS) dengan skor 2, d) sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Responden dengan pilihan jawaban 1 artinya responden tersebut memiliki persepsi sangat tidak setuju dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan di sekolah, responden dengan pilihan jawaban 2 artinya responden tidak setuju terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

yang sudah dilaksanakan di sekolah, responden dengan pilihan jawaban 3 artinya responden setuju dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan di sekolah dan responden dengan pilihan jawaban 4 artinya responden sangat setuju dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan di sekolah.

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Standar Nasional Se-Kabupaten Kendal, yaitu SMP Negeri 1 Boja Kendal, SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, SMP Negeri 1 Weleri Kendal dan SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal.

Adapun alasan yang mendasari peneliti memilih Kabupaten Kendal sebagai obyek penelitian adalah disamping belum adanya penelitian sejenis tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah di Kabupaten Kendal juga masih adanya sekolah yang dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah tidak transparan dan akuntabel.

Sedangkan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional menjadi pilihan karena sekolah ini merupakan sekolah-sekolah terbaik dilihat dari sisi prestasi akademik, memiliki jumlah siswa banyak dan memiliki jumlah anggaran sekolah (APBS) yang sangat besar, dimana seharusnya sekolah standar nasional ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain dalam hal pengelolaan keuangan sekolah yang baik dari sudut transparansi dan akuntabilitasnya.

3.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

3.6. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan memberikan questioner kepada *stakeholder* yang menjadi obyek penelitian. Di dalam questioner terdapat dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dalam pertanyaan terbuka terdiri pengisian identitas responden dan responden memberikan pandangan mereka tentang pelaporan keuangan dan kebutuhan informasi lain dari pelaporan keuangan, sedangkan dalam pertanyaan tertutup responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan persepsi yang dimiliki.

Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial digunakan skala likert, dimana jawaban setiap item pertanyaan dalam instrumen mempunyai gradasi dari sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun data skunder diperoleh dengan melakukan analisis dokumen dan melakukan studi pustaka.

Berdasarkan perhitungan jumlah populasi dan jumlah sampel yang akan diteliti yang sudah diketahui jumlahnya maka kuesioner yang dikirim ke sekolah adalah sejumlah sampel yang akan diteliti. Kuesioner dikirim langsung oleh peneliti kepada responden dimana yang bersangkutan bekerja dengan diberikan penjelasan sebelumnya, selanjutnya responden diberikan kesempatan selama satu minggu untuk melakukan pengisian, setelah satu minggu peneliti kembali datang di kantor dimana responden bekerja untuk mengambil kuesioner yang telah diisi untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Adapun jadwal pengiriman dan batas pengambilan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden diatur sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 3.3

JADWAL PENGIRIMAN DAN PENGEMBALIAN KUESIONER

Responden	Tanggal Pengiriman	Tanggal Pengambilan	Keterangan
SMP N 1 Boja	2 September 2009	9 September 2009	
SMP N 1 Sukorejo	3 September 2009	10 September 2009	
SMP N 1 Weleri	4 September 2009	11 September 2009	
SMP N 1 Kendal	5 September 2009	12 September 2009	
SMP N 2 Kendal	7 September 2009	14 September 2009	
Pemeriksa APBS	8 September 2009	15 September 2009	
Dewan Pendidikan	9 September 2009	16 September 2009	
LSM	10 September 2009	17 September 2009	

3.7. Teknik Analisis

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif yang menggambarkan persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga suatu penelitian yang menggunakan kuesioner

sebagai alat pengukurnya perlu diuji validitasnya. Pada uji ini digunakan sampel sebanyak 30 orang. Uji validitas adalah hubungan positif skor item pertanyaan dengan skor total item pertanyaan dalam suatu variabel yang tujuannya mengukur sah tidaknya suatu alat ukur. Apabila angka r hitung $>$ r tabel, maka penelitian dikategorikan valid. Dan bila sebaliknya, r hitung $<$ r tabel, maka penelitian dikategorikan tidak valid (Sugiyono 2008).

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memiliki Cronbach Alpha $>$ 0.60 (Imam Ghazali 2001).

3.7.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menentukan penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal (Sugiyono 2008)

3.7.4. Uji-t

Uji-t bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Rumus uji-t sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

dimana :

\bar{X} = rata-rata

s = varian

n = jumlah sampel

Pengujian dengan menggunakan uji signifikansi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

- Jika t hitung < t tabel dan p value (nilai sig.) > 0,05 maka Ho diterima:
”Tidak terdapat perbedaan persepsi *stakeholder* internal dan eksternal tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah”.
- Jika t hitung > t tabel dan p value (nilai sig.) < 0,05 maka Ho diterima:
”Terdapat perbedaan persepsi *stakeholder* internal dan eksternal tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah”.

b. Penentuan t tabel

t tabel ditentukan dari derajat bebasnya (df) dan df ditentukan dari jumlah seluruh sampel (N) dan jumlah kategori yang dibedakan (k) jadi df = N - k

Pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional

Sekolah yang menjadi obyek penelitian ini adalah sekolah Menengah Pertama Standar Nasional yang ada di Kabupaten Kendal yang terdiri SMP Negeri 1 Boja, SMP Negeri 1 Sukorejo, SMP Negeri 1 Weleri, SMP Negeri 1 Kendal dan SMP Negeri 2 Kendal, dimana kelima sekolah tersebut merupakan sekolah-sekolah terbaik di eks Kawedanan masing-masing.

Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat di sekitarnya. SMP Negeri 1 Boja menjadi sekolah favoritnya masyarakat di eks Kawedanan Boja, SMP Negeri 1 Sukorejo menjadi favoritnya masyarakat di eks Kawedanan Selokaton, SMP Negeri 1 Weleri menjadi favoritnya masyarakat di eks Kawedanan Weleri sedangkan SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kendal menjadi favoritnya masyarakat eks Kawedanan kota Kendal dan sekitarnya, sekolah-sekolah tersebut mendapat kesempatan pertama sebagai Sekolah Standar Nasional sejak tahun pelajaran 2006/2007.

Secara umum kelima sekolah tersebut memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai sekalipun belum bisa dikatakan lengkap sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), demikian juga tentang sumber daya manusia (guru dan karyawan), sumber dana pembiayaan, prestasi akademis maupun non akademis jika dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di sekitarnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel data yang akan dipaparkan secara singkat di bawah ini :

4.1.1.Data Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah siswa

Sekolah-sekolah Standar Nasional di Kabupaten Kendal rata-rata memiliki jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa yang cukup besar, hal ini terlihat dalam tabel data siswa 3 tahun terakhir di bawah ini :

TABEL 4.1

DATA SISWA 3 TAHUN TERAKHIR

Tahun	SMP 1 Boja		SMP 1 Skr		SMP 1 Weleri		SMP 1 Kdl		SMP 2 Kdl	
	Kls	Siswa	Kls	Siswa	Kls	Siswa	Kls	Siswa	Kls	Siswa
2006/2007	18	676	21	770	18	695	11	456	20	817
2007/2008	18	710	21	778	18	705	14	559	21	788
2008/2009	18	712	21	758	18	690	17	636	20	673

Sumber : Data primer diolah 2009

4.1.2. Data Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, pada umumnya memiliki jumlah yang cukup sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.2

DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tahun	SMP 1 Boja		SMP 1 Skr		SMP 1 Weleri		SMP 1 Kdl		SMP 2 Kdl	
	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary
2008/2009	39	13	46	15	37	13	35	19	41	23
2009/2010	39	13	46	15	37	13	35	19	41	23

Sumber : Data primer diolah 2009

4.1.3. Kondisi Guru dan Karyawan Berdasarkan Kualifikasi Ijazah

Kualifikasi Ijazah bagi guru di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional sebagian besar sudah memiliki kualifikasi ijazah Sarjana (S1) yaitu 134 orang atau 68,78 % dari jumlah guru yang ada yaitu 195 orang, sedangkan yang lainnya masih berijazah Diploma yaitu sejumlah 61 orang atau 31,22 %, sedangkan untuk karyawan sebagian besar masih berijazah SLTA yaitu 55 orang atau 84,62 % sebagaimana tercantum dalam tabel pendidik dan tenaga kependidikan menurut ijazah di bawah ini:

TABEL 4.3

IJAZAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ijazah	SMP 1 Boja		SMP 1 Skr		SMP 1 Weleri		SMP 1 Kdl		SMP 2 Kdl	
	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary	Gr	Kary
SLTA	0	11	0	12	0	12	0	9	0	11
D1	4	3	6	1	2	0	3	0	0	0
D2	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0
D3	5	0	9	1	10	1	3	0	5	1
S1	29	0	24	0	23	0	27	3	31	0
S2	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0
Jumlah	39	14	44	14	37	13	35	12	40	12

Sumber : Data primer diolah 2009

4.1.4. Data Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Berdasarkan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) setiap tahunnya, ternyata Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional juga memiliki anggaran yang cukup besar yaitu sebagai berikut :

TABEL 4.4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

Tahun	SMP 1 Bj	SMP 1 Skr	SMP 1 Wlr	SMP 1 Kdl	SMP 2 Kdl
2007/2008	570.840.000	625.512.000	475.767.500	1.969.533.733	2.288.957.415
2008/2009	572.448.000	609.432/000	504.633.500	3.681.561.600	3.059.199.005

Sumber : Data primer diolah 2009

4.1.5. Data Prestasi Akademik / Ujian Nasional

Menurut data prestasi akademik khususnya hasil ujian nasional kelima Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional tersebut memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya hal ini bisa disajikan data sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 4.5

DATA NILAI PRESTASI AKADEMIK (UN)

Tahun	Rata-rata Nilai UN Semua Mata Pelajaran				
	SMP 1 Bj	SMP 1 Skr	SMP 1 Wlr	SMP 1 Kdl	SMP 2 Kdl
2007/2008	7.80	7,75	8.53	7.28	7.89
2008/2009	7.73	7,70	7.64	6.37	8.26

Sumber : Data primer diolah 2009

4.2. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah guru, karyawan dan pengurus komite sekolah yang merupakan *stakeholders* internal dan pemeriksa APBS di Dinas

Dikpora Kabupaten Kendal, anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal serta anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang merupakan *stakeholders* eksternal.

Stakeholder internal dipilih guru, karyawan dan pengurus komite sekolah dengan pertimbangan ketiga responden bisa mewakili kepentingan publik khususnya yang berada di lingkungan sekolah, sedangkan *stakeholder* eksternal dipilih pemeriksa APBS di Dians Dikpora Kab.Kendal, anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kendal, serta anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pertimbangan ketiga responden tersebut bisa mewakili kepentingan publik khususnya yang berada di luar sekolah.

4.2.1. Pendidikan Responden

Adapun tentang tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dipaparkan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.6
PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan	Stakeholder				Total	
	Internal		Eksternal		F	%
	F	%	f	%		
SMA/SMEA/SMK	33	21,3	0	0,0	33	19,0
D1	3	1,9	0	0,0	3	1,7
D2	6	3,9	0	0,0	6	3,4
D3	16	10,3	0	0,0	16	9,2
S1	92	59,4	12	63,2	104	59,8
S2	5	3,2	7	36,8	12	6,9
Total	155	100,0	19	100,0	174	100,0

Sumber : Data Primer diolah 2009

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar baik *stakeholder* internal maupun eksternal berpendidikan S1 yaitu sebesar 59,4% untuk *stakeholder* internal dan 63,2% untuk *stakeholder* eksternal. Responden *stakeholder* eksternal tidak ada yang berpendidikan kurang dari S1 misalnya D3 atau yang berpendidikan di bawahnya.

4.2.2. Usia Responden

Berdasarkan tingkat usia dari seluruh responden yang menjadi obyek penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.7
USIA RESPONDEN

Usia Responden	Stakeholder				Total	
	Internal		Eksternal		F	%
	F	%	f	%		
20-30 tahun	21	13,5	1	5,3	22	12,6
31-40 tahun	37	23,9	3	15,8	40	23,0
41-50 tahun	74	90,2	8	42,1	82	47,1
51-60 tahun	22	14,2	7	36,8	29	16,7
61-70 tahun	1	0,6	0	0,0	1	0,6
Total	155	100,0	19	100,0	174	100,0

Sumber : Data Primer Diolah 2009

Tabel 4.7 di atas menunjukkan distribusi responden menurut kategori usia, didapatkan bahwa sebagian besar baik *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal berusia antara 41-50 tahun, yaitu responden *stakeholder* internal sebesar 74 orang (90,2 %) sedangkan responden *stakeholder* eksternal sebesar 8 orang (42,1%).

4.2.3. Jenis Kelamin Responden

Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini seperti tertuang pada tabel berikut :

TABEL 4.8
JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin Responden	Stakeholder				Total	
	Internal		Eksternal		F	%
	F	%	f	%		
Perempuan	76	49,0	2	10,5	78	44,8
Laki-laki	79	51,0	17	89,5	96	55,2
Total	155	100,0	19	100,0	174	100,0

Sumber : Data Primer Diolah 2009

Tabel 4.8 di atas menunjukkan distribusi responden menurut jenis kelamin, didapatkan bahwa responden *stakeholder* internal lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 79 orang (51%), demikian juga jenis kelamin laki-laki mendominasi responden *stakeholder* eksternal yaitu sebesar 17 orang (89,5%) dan secara keseluruhan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 96 orang (55,2%).

4.2.4. Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner yang telah diisi tentang persepsi *stakeholder* terhadap Transparansi pengelolaan keuangan sekolah, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

TABEL 4.9
PERSEPSI *STAKEHOLDER* (INTERNAL DAN EKSTERNAL) TERHADAP
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH STANDAR NASIONAL

No.	Pertanyaan	STS		TS		S		SS	
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1	x1	0	0	3	1	75	11	77	7

		0,0%	0,0%	75,0%	25,0%	87,2%	12,8%	91,7%	8,3%
2	x2	0 0,0%	0 0,0%	6 75,0%	2 25,0%	77 89,5%	9 10,5%	72 90,0%	8 10,0%
3	x3	0 0,0%	0 0,0%	11 84,6%	2 15,4%	76 86,4%	12 13,6%	68 93,2%	5 6,8%
4	x4	1 100,0%	0 0,0%	12 75,0%	4 25,0%	97 88,2%	13 11,8%	45 95,7%	2 4,3%
5	x5	2 66,7%	1 33,3%	14 77,8%	2 22,2%	96 89,7%	11 10,3%	43 93,5%	3 6,5%
6	x6	2 66,7%	1 33,3%	19 86,4%	3 13,6%	85 88,5%	11 11,5%	49 92,5%	4 7,5%
7	x7	0 0,0%	1 100,0%	19 86,4%	3 13,6%	85 88,5%	11 11,5%	49 92,5%	4 7,5%
8	x8	0 0,0%	0 0,0%	4 36,4%	7 63,3%	82 91,1%	8 8,9%	69 94,5%	4 5,5%
9	x9	0 0,0%	1 100,0%	7 77,8%	2 22,2%	87 87,9%	12 12,1%	61 93,8%	4 6,2%
10	x10	0 0,0%	0 0,0%	1 10,0	0 0,0	65 85,5	11 14,5	89 91,8	8 8,2
11	x11	0 0,0%	0 0,0%	2 40,0	3 60,0	81 90,0	9 10,0	72 91,1	7 8,9
12	x12	1 100,0%	0 0,0%	4 100,0%	0 0,0%	92 89,3%	11 10,7%	58 87,9%	8 12,1%
13	x13	1 100,0%	0 0,0%	15 78,9%	4 21,1%	83 88,3%	11 11,7%	56 93,3%	4 6,7%
14	x14	0 0,0%	0 0,0%	10 66,7%	5 33,3%	102 90,3%	11 9,7%	43 93,5%	3 6,5%
15	x15	0 0,0%	0 0,0%	2 100,0%	0 0,0%	65 82,3%	14 17,7%	88 94,6%	5 5,4%
16	x16	0 0,0%	0 0,0%	2 100,0%	0 0,0%	75 88,2%	10 11,8%	78 89,7%	9 10,3%
17	x17	0 0,0%	0 0,0%	2 50,0%	2 50,0%	94 87,9%	13 12,1%	59 93,7%	4 6,3%
18	x18	0 0,0%	0 0,0%	2 66,7%	1 33,3%	61 91,0%	6 9,0%	92 88,5%	12 11,5%
19	x19	0 0,0%	0 0,0%	7 87,5%	1 12,5%	72 92,3%	6 7,7%	76 86,4%	12 13,6%
20	x20	0 0,0%	0 0,0%	4 80,0%	1 20,0%	77 89,5%	9 10,5%	74 89,2%	9 10,8%
21	x21	0 0,0%	0 0,0%	6 75,0%	2 25,0%	85 87,6%	12 12,4%	64 92,8%	5 7,2%
22	x22	0 0,0%	0 0,0%	5 83,3%	1 16,7%	88 85,4%	15 14,6%	62 95,4%	3 4,6%
23	x23	0 0,0%	0 0,0%	6 66,7%	3 33,3%	73 88,0%	10 12,0%	76 92,7%	6 7,3%

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 23 pertanyaan untuk menggali persepsi responden tentang transparansi pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, lebih dari 50% responden dengan jawaban setuju didominasi oleh

stakeholder internal daripada *stakeholder* eksternal begitu juga jawaban dengan kategori sangat setuju.

TABEL 4.10

PERSEPSI *STAKEHOLDER* (INTERNAL DAN EKSTERNAL) TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL

No.	Pertanyaan	STS		TS		S		SS	
		Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1	X24	0 0,0%	0 0,0%	6 60,0%	4 40,0%	98 89,9%	11 10,1%	51 92,7%	4 7,3%
2	X25	0 0,0%	0 0,0%	2 25,0%	6 75,0%	90 91,8%	8 8,2%	63 92,6%	5 7,4%
3	X26	0 0,0%	0 0,0%	9 90,0%	1 10,0%	74 88,1%	10 11,9%	72 90,0%	8 10,0%
4	X27	0 0,0%	0 0,0%	2 66,7%	1 33,3%	63 82,9%	13 17,1%	90 94,7%	5 5,3%
5	X28	0 0,0%	0 0,0%	4 44,4%	5 55,6%	81 90,0%	9 10,0%	70 93,3%	5 6,7%
6	X29	0 0,0%	0 0,0%	2 100,0%	0 0,0%	72 83,7%	14 16,3%	81 94,2%	5 5,8%
7	X30	0 0,0%	0 0,0%	2 66,7%	1 33,3%	78 83,9%	15 16,1%	75 96,2%	3 3,8%
8	X31	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	55 83,3%	11 16,7%	100 92,6%	8 7,4%
9	X32	0 0,0%	0 0,0%	2 50,0%	2 50,0%	83 87,4%	12 12,6%	70 93,3%	5 6,7%
10	X33	0 0,0%	0 0,0%	1 16,7%	5 83,3%	95 91,3%	9 8,7%	59 92,2%	5 7,8%
11	X34	0 0,0%	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	68 84,0%	13 16,0%	86 93,5%	6 6,5%

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 11 pertanyaan untuk menggali persepsi responden tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional, lebih dari 50% responden dengan jawaban setuju didominasi oleh *stakeholder* internal daripada *stakeholder* eksternal, begitu juga jawaban dengan kategori sangat setuju.

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner mengenai variabel persepsi *stakeholders* tentang transparansi dan akuntabilitas. Sebelum menggunakan kuesioner untuk penelitian, semua variabel dilakukan uji coba kuesioner yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kesahihan dan keandalan instrumen penelitian, menggunakan sampel yang mirip dengan responden sebenarnya sebanyak 30 sampel. Pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan Program SPSS.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang akan diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas/tingkat kehandalan kuesioner dimana kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten/stabil dari waktu ke waktu (Gozali 2006).

Uji validitas dan reliabilitas pada hakikatnya adalah uji korelasi *Pearson Product Moment (One Tailed)* yaitu hubungan antara skor item pertanyaan dengan skor total item pertanyaan dalam variabel, dengan ketentuan sebagai berikut : jika r hitung $>$ r tabel maka item pertanyaan valid dan jika r alpha $>$ 0,6 (nilai batas minimum *Alpha Cronbach*) maka variabel dikatakan reliabel. Sedangkan r tabel ditentukan dari derajat bebasnya atau yang biasa dilambangkan dengan df (Degree of Freedom)(Gozali 2006).

Pada penelitian ini sebelum melakukan pengambilan data untuk mendapatkan jawaban hipotesis yang sesungguhnya, seluruh item-item diujicobakan ke sejumlah sampel sebanyak 30 dengan spesifikasi yang sama dengan sampel. Jika sampel uji validitas dan reliabilitas sebanyak 30 maka diperoleh $df = N - k = 30 - 2 = 28$, dimana k

merupakan variabel yang masuk dalam analisis, sehingga r tabel dengan $df_{28} = 0,3061$.

4.3.1.1. Uji Validitas

1. Uji Validitas Persepsi *Stakeholders* Tentang Transparansi

Untuk mengetahui validitas item-item pertanyaan variabel Transparansi, di bawah ini disajikan hasil Uji Validitas Persepsi *Stakeholder* tentang Transparansi sebagai berikut :

TABEL 4.11

HASIL UJI VALIDITAS PERSEPSI *STAKEHOLDER* TENTANG TRANSPARANSI

No	Item Pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
1	X1	0,3061	0,6897	Valid
2	X2	0,3061	0,6921	Valid
3	X3	0,3061	0,5470	Valid
4	X4	0,3061	0,6866	Valid
5	X5	0,3061	0,4783	Valid
6	X6	0,3061	0,4902	Valid
7	X7	0,3061	0,6530	Valid
8	X8	0,3061	0,3197	Valid
9	X9	0,3061	0,3733	Valid
10	X10	0,3061	0,6925	Valid
11	X11	0,3061	0,4782	Valid
12	X12	0,3061	0,4054	Valid
13	X13	0,3061	0,6523	Valid
14	X14	0,3061	0,7459	Valid
15	X15	0,3061	0,3800	Valid
16	X16	0,3061	0,6259	Valid
17	X17	0,3061	0,6255	Valid
18	X18	0,3061	0,8334	Valid
19	X19	0,3061	0,3498	Valid
20	X20	0,3061	0,5596	Valid
21	X21	0,3061	0,5180	Valid
22	X22	0,3061	0,8277	Valid
23	X23	0,3061	0,8200	Valid

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji validitas persepsi *stakeholders* tentang transparansi, menunjukkan nilai r hitung semua item pertanyaan hasilnya lebih besar dari r table, nilainya berkisar antara 0,3197 s/d 0,8277 sehingga variabel persepsi *stakeholders* tentang transparansi mempunyai item-item pertanyaan yang valid semua.

2. Uji Validitas Persepsi Stakeholders Tentang Akuntabilitas

Untuk mengetahui validitas item-item pertanyaan variabel Akuntabilitas, di bawah ini disajikan hasil Uji Validitas Persepsi *Stakeholder* tentang Akuntabilitas sebagai berikut :

TABEL 4.12

HASIL UJI VALIDITAS PERSEPSI *STAKEHOLDER* TENTANG AKUNTABILITAS

No	Item Pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
1	X24	0,3061	0,6363	Valid
2	X25	0,3061	0,5819	Valid
3	X26	0,3061	0,5625	Valid
4	X27	0,3061	0,5324	Valid
5	X28	0,3061	0,7943	Valid
6	X29	0,3061	0,8072	Valid
7	X30	0,3061	0,7065	Valid
8	X31	0,3061	0,3176	Valid
9	X32	0,3061	0,5625	Valid
10	X33	0,3061	0,6291	Valid
11	X34	0,3061	0,7199	Valid

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji validitas persepsi *stakeholders* tentang akuntabilitas, menunjukkan nilai r hitung semua item pertanyaan hasilnya lebih besar dari r tabel yaitu antara 0,3176 s/d 0,8072 sehingga semua item pertanyaan pada variabel persepsi *stakeholders* tentang akuntabilitas memenuhi syarat untuk

digunakan mengambil data penelitian karena mempunyai item-item pertanyaan yang valid semua.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Adapun hasil uji Reliabilitas Persepsi *Stakeholder* tentang Transparansi dan Akuntabilitas disajikan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.13

UJI RELIABILITAS PERSEPSI *STAKEHOLDER* (INTERNAL DAN EKSTERNAL) TENTANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

No	Nama Variabel	Alpha Cronbach	Alpha hitung	Keterangan
1	Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Transparansi	0,6000	0,9294	Reliabel
2	Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Akuntabilitas	0,6000	0,8909	Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel penelitian, didapatkan nilai alpha variabel persepsi *stakeholder* tentang transparansi sebesar $0,9294 > 0,6$ dan nilai alpha variabel persepsi *stakeholder* tentang akuntabilitas sebesar $0,8909 > 0,6$ sehingga semua variabel dikatakan reliable.

4.3.1.3. Uji Normalitas Data Berdasarkan Aspek Variabel Transparansi

Uji normalitas data yang dilakukan dengan Kolmogorov Smirov Test dari empat aspek variabel transparansi keuangan sekolah menurut *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal seperti di tampilkan pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.14

UJI NORMALITAS DATA DARI EMPAT ASPEK VARIABEL TRANSPARANSI

Empat Aspek Variabel Transparansi Keuangan sekolah	Kategori	N	Nilai p	Keterangan
Susunan Organisasi dan Tata Keuangan Sekolah	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,200	Normal
Ketersediaan Informasi Kepada Publik	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,200	Normal
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Secara Terbuka	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,005	Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,063	Normal
Jaminan Integritas	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,000	Tidak normal

Sumber : Data primer diolah 2009

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi responden *stakeholder* internal tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$, maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,200 > 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang ketersediaan informasi kepada publik sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,200 > 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,005 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* internal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,063 > 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang jaminan integritas sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* internal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut juga terdistribusi tidak normal.

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata persepsi responden tentang transparansi keuangan sekolah dilakukan uji statistik dengan *Independent Samples Test* sebagai uji yang membedakan rata-rata dua sampel yang berbeda. Uji ini mensyaratkan data harus berdistribusi normal baik salah satu maupun semua, seperti data pada susunan organisasi dan tata keuangan sekolah salah satu datanya tidak berdistribusi normal maka uji hipotesisnya menggunakan uji *Mann Whitney*.

Adapun hasil uji statistiknya seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.15

HASIL UJI STATISTIK PERBEDAAN RATA-RATA PERSEPSI RESPONDEN TENTANG TRANSPARANSI

Empat Aspek Variabel Transparansi Keuangan sekolah	Kategori	N	Mean	Nilai p uji beda rata-rata	Kesimpulan
Susunan Organisasi dan Tata Keuangan Sekolah	<i>Stakeholder</i> Internal	155	10,2710	0,130	Tidak ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	9,7895		
Ketersediaan Informasi Kepada Publik	<i>Stakeholder</i> Internal	155	19,7161	0,006	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	17,5789		
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Secara Terbuka	<i>Stakeholder</i> Internal	155	41,0839	0,139	Tidak ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	39,5263		
Jaminan Integritas	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,9567	0,017	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,9912		

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.15 di atas menunjukkan hasil uji statistik perbedaan rata-rata persepsi responden tentang transparansi keuangan sekolah. Rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal sebesar 10,2710, lebih tinggi daripada rata-rata nilai

yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 9,7895 tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah. Hal tersebut tidak didukung dengan nilai p value-nya yang hanya sebesar $0,130 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah.

Stakeholder internal mendapat rata-rata nilai sebesar 19,7161 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 17,5789 tentang ketersediaan informasi kepada publik. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,006 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang ketersediaan informasi kepada publik.

Selanjutnya *Stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 41,0839 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 39,5263 tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,139 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka.

Terakhir untuk aspek jaminan integritas *Stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 6,8194 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 6,2632. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,017 < 0,05$, maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang jaminan integritas.

4.3.1.4. Uji Normalitas Data Berdasarkan Aspek Variabel Akuntabilitas

Uji normalitas data yang dilakukan dengan Kolmogorov Smirov Test dari lima aspek variabel akuntabilitas keuangan sekolah menurut *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.16

UJI NORMALITAS DATA DARI LIMA ASPEK
VARIABEL AKUNTABILITAS

Lima Aspek Variabel Akuntabilitas Keuangan sekolah	Kategori	N	Nilai p	Keterangan
Akuntabilitas APBS	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Terdistribusi Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,096	Terdistribusi Normal
Laporan Keuangan Periodik	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Terdistribusi Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,006	Terdistribusi Tidak Normal
Pertanggungjawaban tahunan	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Terdistribusi Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,002	Terdistribusi Tidak Normal
Laporan investigatif	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Terdistribusi Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,006	Terdistribusi Tidak normal
Tingkat akuntabilitas secara keseluruhan	<i>Stakeholder</i> Internal	155	0,000	Terdistribusi Tidak normal
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	0,000	Terdistribusi Tidak normal

Sumber : Data Primer diolah 2009

Berdasarkan table 4.16 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi responden *stakeholder* internal tentang akuntabilitas APBS sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,096 > 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang laporan keuangan periodik sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,006 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang pertanggungjawaban tahunan sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,002 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang laporan investigatif sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,006 < 0,05$ maka data tersebut juga terdistribusi tidak normal.

Persepsi responden *stakeholder* internal tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan sebanyak 155 sampel mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut terdistribusi tidak normal, sedangkan responden *stakeholder* eksternal dengan jumlah responden sebanyak 19 mempunyai nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka data tersebut juga terdistribusi tidak normal.

Sama halnya dengan uji statistik persepsi responden tentang transparansi keuangan sekolah, uji statistik persepsi responden tentang akuntabilitas keuangan sekolah yaitu *Independent Samples Test* sebagai uji yang membedakan rata-rata dua sampel yang berbeda mensyaratkan data harus berdistribusi normal baik salah satu maupun semua. Seperti data pada akuntabilitas APBS salah satu datanya tidak berdistribusi normal maka uji hipotesisnya menggunakan *Mann Whitney*.

Adapun hasil uji statistiknya seperti terdapat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.17

HASIL UJI STATISTIK PERBEDAAN RATA-RATA PERSEPSI
RESPONDEN TENTANG AKUNTABILITAS

Lima Aspek Variabel Akuntabilitas Keuangan sekolah	Kategori	N	Mean	Nilai p uji beda rata-rata	Kesimpulan
Akuntabilitas APBS	<i>Stakeholder</i> Internal	155	13,6581	0,018	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	9	12,5263		
Laporan Keuangan Periodik	<i>Stakeholder</i> Internal	155	10,4065	0,003	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	9	9,3684		
Pertanggungjawaban tahunan	<i>Stakeholder</i> Internal	155	7,0839	0,028	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	9	6,5789		
Laporan investigatif	<i>Stakeholder</i> Internal	155	3,3742	0,022	Ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	9	3,0000		
Tingkat akuntabilitas secara keseluruhan	<i>Stakeholder</i> Internal	155	3,5484	0,054	Tidak ada perbedaan
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	9	3,3158		

Sumber : Data primer diolah 2009

Berdasarkan table 4.17 di atas, rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal sebesar 13,6581 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 12,5263 tentang akuntabilitas APBS. Hal tersebut didukung dengan nilai p value-nya sebesar $0,018 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas APBS.

Tentang laporan keuangan periodik *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 10,4065 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 9,3684. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,003 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang laporan keuangan periodik.

Selanjutnya tentang pertanggungjawaban tahunan *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 7,0839 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 6,5789. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,028 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata nilai yang

diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang pertanggungjawaban tahunan.

Tentang laporan investigatif *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 3,3742 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 3,0000. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,022 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang laporan investigatif.

Terakhir tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 3,5484 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 3,3158. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,054 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan.

4.3.1.5. Uji Normalitas Data

Selanjutnya untuk mengetahui apakah data yang akan diolah terdistribusi secara normal, di bawah ini disajikan hasil Uji Normalitas Data sebagai berikut :

TABEL 4.18

UJI NORMALITAS DATA

No	Nama Variabel	p hitung	Keterangan	Kesimpulan
1	Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Transparansi	0,591	$> 0,05$	Data terdistribusi normal
2	Persepsi <i>Stakeholder</i> Tentang Akuntabilitas	0,008	$< 0,05$	Data tidak terdistribusi normal

Sumber : Data primer diolah 2009

Dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel persepsi *stakeholder* tentang transparansi mempunyai nilai p sebesar $0,591 > 0,05$ maka variabel tersebut berdistribusi normal sehingga uji hipotesis selanjutnya menggunakan statistik parametrik yaitu uji *t independent sample*.

Sedangkan variabel persepsi *stakeholder* tentang akuntabilitas mempunyai nilai p sebesar $0,008 < 0,05$ maka variabel tersebut berdistribusi tidak normal sehingga uji hipotesis selanjutnya menggunakan statistik non parametrik yaitu *Mann Whitney*.

4.4. Persepsi *Stakeholders* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional

Di bawah ini ditampilkan data rata-rata nilai persepsi *stakeholder* internal dan eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional sebagai berikut :

TABEL 4.19

RATA-RATA NILAI *STAKEHOLDER* INTERNAL DAN EKSTERNAL TENTANG TRANSPARANSI

No.	Variabel	N	Mean	Std. Deviation
1	<i>Stakeholder</i> Internal	155	77,89	8,39
2	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	73,16	9,28

Sumber : Data primer diolah 2009

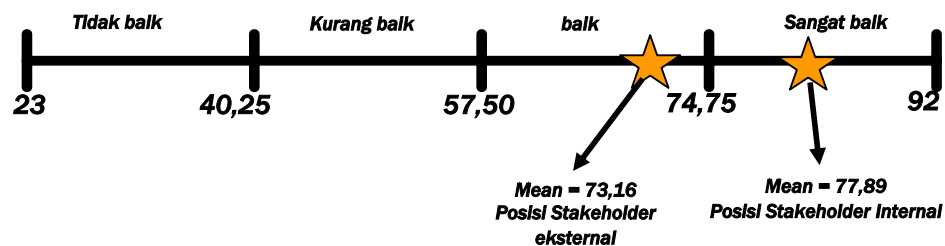
Data persepsi *stakeholder* internal maupun eksternal tentang transparansi yang diambil dari kuesioner yang berisi 23 butir soal dengan 4 alternatif jawaban pada rating skala 1 s/d 4 sehingga didapatkan skor ideal maksimal ($23 \times 4 = 92$) dan

skor minimal ($23 \times 1 = 23$), rentang skor ideal 23 s.d. 92. Dari hasil jawaban responden didapatkan nilai rata-rata persepsi *stakeholder* internal maupun eksternal tentang transparansi sebesar 77,89 dan standar deviasinya sebesar 8,39.

Apabila data dibagi menjadi 4 kategori yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik maka berdasarkan rata-ratanya variabel persepsi *stakeholder* internal tentang transparansi masuk kategori sangat baik yaitu pada skala interval 74,75 sampai dengan 92. Sedangkan variabel persepsi *stakeholder* eksternal --tentang transparansi diperoleh rata-rata sebesar 73,16 dengan standar deviasi sebesar 9,27 maka variabel persepsi *stakeholder* eksternal tentang transparansi masuk kategori baik yaitu pada skala interval 57,50 sampai dengan 74,75. Dengan pembagian interval diperoleh dari rank sebesar 69 ($92-23$) dibagi dengan 4 kategori sehingga diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar 17,25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 4.1

POSISI RATA-RATA VARIABEL PERSEPSI
STAKEHOLDER TENTANG TRANSPARANSI



4.5. Persepsi *Stakeholders* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional

Di bawah ini ditampilkan data rata-rata nilai persepsi *stakeholder* internal dan eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional sebagai berikut :

TABEL 4.20

RATA-RATA NILAI *STAKEHOLDER* INTERNAL DAN EKSTERNAL TENTANG AKUNTABILITAS

No.	Variabel	N	Mean	Std. Deviation
1	<i>Stakeholder</i> Internal	155	38,07	4,08
2	<i>Stakeholder</i> Eksternal	19	34,79	4,53

Sumber : Data primer diolah 2009

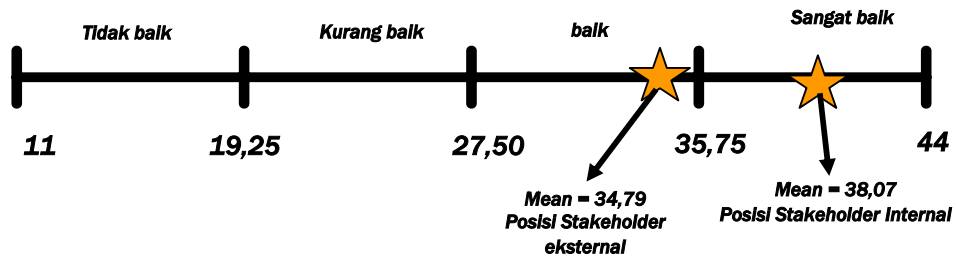
Data persepsi *stakeholder* internal maupun eksternal tentang akuntabilitas yang diambil dari kuesioner yang berisi 11 butir soal dengan 4 alternatif jawaban pada rating skala 1 s/d 4 sehingga didapatkan skor ideal maksimal ($11 \times 4 = 44$) dan skor minimal ($11 \times 1 = 11$), rentang skor ideal 11 s.d. 44. Dari hasil jawaban responden didapatkan nilai rata-rata persepsi *stakeholder* internal tentang akuntabilitas sebesar 38,07 dan standar deviasinya sebesar 4,08.

Apabila data dibagi menjadi 4 kategori yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik maka variabel persepsi *stakeholder* internal tentang akuntabilitas masuk kategori sangat baik yaitu pada skala interval 35,75 sampai dengan 44.

Sedangkan variabel persepsi *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas diperoleh rata-rata sebesar 34,79 dengan standar deviasi sebesar 4,53 maka variabel persepsi *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas masuk kategori baik yaitu pada skala interval 27,5 sampai dengan 35,75. Dengan pembagian interval diperoleh dari rank sebesar 33 ($44-11$) dibagi dengan 4 kategori sehingga diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar 8,25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 4.2

POSISI RATA-RATA VARIABEL PERSEPSI STAKEHOLDER
TENTANG AKUNTABILITAS



4.6. Uji t

4.6.1. Transparansi

Berdasarkan hasil Uji-t perbedaan rata-rata *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal tentang transparansi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.21

UJI PERBEDAAN RATA-RATA *STAKEHOLDER* INTERNAL
DAN *STAKEHOLDER* EKSTERNAL TENTANG TRANSPARANSI

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Transparansi	Equal variances assumed	.117	.733	2.293	172	.023	4.7324	2.06399	.65842	8.80644
	Equal variances not assumed			2.120	21.771	.046	4.7324	2.23216	.10039	9.36447

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel 4.21 di atas merupakan hasil uji t independent dengan program SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar $2,293 > t$ tabel dengan tingkat signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$, dimana t tabel dengan df 172 sebesar 1,9739, sehingga hipotesis nol ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi *stakeholder* internal dengan persepsi *stakeholder* eksternal tentang transparansi.

Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal adalah 77,89 sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal adalah 73,16, artinya nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal.

4.6.2. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil Uji-t perbedaan rata-rata *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.22

UJI PERBEDAAN RATA-RATA *STAKEHOLDER* INTERNAL DAN *STAKEHOLDER* EKSTERNAL TENTANG AKUNTABILITAS

Test Statistics ^a	
	Akuntabilitas
Mann-Whitney U	906.500
Wilcoxon W	1096.500
Z	-2.742
Asymp. Sig. (2-tailed)	.006

a. Grouping Variable: Kategori

Tabel 4.22 di atas merupakan hasil uji t independen Mann Whitney karena data tidak terdistribusi normal, diperoleh nilai Z hitung sebesar 2,742 > Z tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 < 0,05, dimana Z tabel sebesar 1,96, sehingga hipotesis nol ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi *stakeholder* internal dengan persepsi *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas.

Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal adalah 38,07 sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal adalah 34,79,

artinya nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal.

4.7. Pembahasan

Mengacu pada hasil uji-t sebagaimana tertuang dalam tabel 4.19 dan tabel 4.20, bahwa nilai rata-rata persepsi *stakeholder* internal lebih baik dibanding dan *stakeholder* eksternal tentang transparansi dan akuntabilitas yaitu 77,89 dan 73,16 serta 38,07 dan 34,79 tentang pengelolaan keuangan sekolah, dimana persepsi *stakeholder* internal lebih tinggi dibanding *stakeholder* eksternal. Hal ini mengandung makna bahwa keterlibatan *stakeholder* internal sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan penyusunan pelaporan bisa memberikan pengaruh persepsi yang sangat baik terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pelaporan sekolah harus melibatkan tidak hanya *stakeholder* internal akan tetapi juga *stakeholder* eksternal. Hal ini sesuai dengan teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menuntut kemampuan sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* (Suryana 2008).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sejenis tentang akuntabilitas kinerja di DIY yang dilakukan oleh Jumirin Asyikin (2001) dimana disana disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan persepsi kepala dinas/kepala kantor terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah.

4.7.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama tentang Persepsi *Stakeholder* internal dan eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah

Berdasarkan hasil Uji-t independent dengan bantuan program SPSS untuk hipotesis pertama yang berbunyi “ Terdapat perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah“ diperoleh nilai t hitung sebesar $2,293 > t$ tabel dengan tingkat signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$, dimana t tabel dengan df 172 sebesar 1,9739, sehingga hipotesis diterima artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi *stakeholder* internal dengan persepsi *stakeholder* eksternal tentang transparansi. Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal.

Adanya perbedaan rata-rata persepsi antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah disebabkan karena *stakeholder* internal yang terdiri dari guru, karyawan dan komite sekolah terlibat dari awal sejak sekolah membuat perencanaan, melaksanakan anggaran dan membuat pelaporan keuangannya.

Keterlibatan dan melihat sendiri tentang pengelolaan keuangan sekolah dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh *stakeholder* internal, sehingga mengetahui kalau di sekolah sudah ada keterbukaan dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam mengelola keuangan sekolah tentunya menyebabkan mereka akan memberikan persepsi yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Hal ini bisa berbeda dengan persepsi *stakeholder* eksternal yang terdiri dari peneliti APBS dinas pendidikan, dewan pendidikan dan LSM peduli pendidikan yang dari awal tidak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan sekolah, sehingga persepsi mereka kemungkinan hanya didasarkan adanya laporan

dari masyarakat tentang tidak adanya keterbukaan sekolah dalam pengelolaan keuangannya.

Hasil uji beda empat aspek Variabel Transparansi keuangan sekolah, berdasarkan hasil uji statistik perbedaan rata-rata persepsi responden tentang aspek transparansi keuangan sekolah dihasilkan rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal sebesar 10,2710 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 9,7895 tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah.

Karena hasil tersebut tidak didukung dengan nilai p value-nya yaitu hanya sebesar $0,130 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah.

Hasil uji statistik ini mengandung makna bahwa antara *stakeholder* internal dan eksternal terdapat kesamaan persepsi tentang susunan organisasi dan tata keuangan sekolah, hal ini bisa disebabkan karena adanya tupoksi dan fungsi unit kerja yang telah terdefinisi dengan jelas dan tidak adanya *overlapping* tugas pokok dan fungsi antar petugas.

Selanjutnya untuk aspek kedua tentang ketersediaan informasi kepada publik, *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 19,7161 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 17,5789. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,006 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang ketersediaan informasi kepada publik.

Hasil statistik ini mengandung arti bahwa antara *stakeholder* internal dan eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang ketersediaan informasi kepada publik,

hal ini bisa disebabkan informasi laporan keuangan sekolah dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk publik tentang APBS belum tersedia, sehingga sekolah harus merespon dengan memberikan atau menyediakan informasi yang memadai kepada publik tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Untuk aspek ketiga yaitu tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka, *stakeholder* internal memperoleh nilai rata-rata sebesar 41,0839 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 39,5263. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,139 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka.

Makna hasil ini adalah bahwa tentang penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran secara terbuka tentang pengelolaan keuangan sekolah, persepsi antara *stakeholder* internal dan eksternal tidak ada perbedaan, hal ini bisa disebabkan baik *stakeholder* internal maupun eksternal memiliki kesamaan persepsi tentang penyusunan, pelaporan dan pelaporan anggaran secara terbuka.

Selanjutnya untuk aspek ke empat tentang jaminan integritas, *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 6,8194 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 6,2632. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,017 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang jaminan integritas.

Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa antara *stakeholder* internal dan eksternal memiliki perbedaan persepsi tentang aspek jaminan integritas pengelolaan keuangan sekolah, hal ini bisa disebabkan bahwa menurut persepsi *stakeholder*

eksternal sekolah kurang menunjukkan prioritas dalam pengembangan sekolah dan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah

4.7.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua tentang Persepsi *Stakeholder* internal dan eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah

Berdasarkan hasil uji-t independen Mann Whitney karena data tidak terdistribusi normal untuk hipotesis kedua diperoleh nilai Z hitung sebesar $2,742 > Z$ tabel dengan tingkat signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$, dimana Z tabel sebesar 1,96. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Terdapat perbedaan rata-rata persepsi *stakeholder* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah“ diterima, artinya ada perbedaan yang signifikan persepsi *stakeholder* internal dengan persepsi *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas. Nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* internal lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang diperoleh persepsi *stakeholder* eksternal.

Perbedaan ini disebabkan *stakeholder* internal khususnya komite sekolah secara periodik (setiap triwulan maupun tahunan) menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari masyarakat dan mengetahui adanya laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah atau sumber lain kepada pemerintah atau pemberi dana.

Berbeda dengan *stakeholder* eksternal yang tidak menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara langsung dari sekolah, sehingga memungkinkan mereka memiliki persepsi yang berbeda tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dibanding *stakeholder* internal.

Hasil uji beda berdasarkan lima aspek Variabel Akuntabilitas keuangan sekolah untuk aspek pertama tentang akuntabilitas APBS rata-rata nilai yang

diperoleh *stakeholder* internal sebesar 13,6581 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 12,5263. Hal tersebut didukung dengan nilai p value-nya sebesar $0,018 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang akuntabilitas APBS.

Hasil uji statistik ini dapat artikan bahwa antara *stakeholder* internal dan eksternal ada perbedaan persepsi tentang aspek akuntabilitas APBS, hal ini bisa disebabkan sekolah belum menampung aspirasi masyarakat dalam menyusun APBS dan keterlibatan komite sekolah dalam menyusun APBS masih kurang.

Selanjutnya untuk hasil aspek kedua yaitu tentang laporan keuangan periodik *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 10,4065 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal yang sebesar 9,3684. Karena didapatkan nilai p sebesar $0,003 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang laporan keuangan periodik.

Makna dari hasil uji ini adalah bahwa antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang laporan keuangan periodik, hal ini bisa disebabkan penyampaian laporan keuangan kepada publik masih harus ditingkatkan dan isi laporan keuangan yang disampaikan kepada publik belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya untuk aspek ketiga tentang pertanggungjawaban tahunan *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 7,0839 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal yang sebesar 6,5789. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,028 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada perbedaan

rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang pertanggungjawaban tahunan.

Hasil ini memberikan arti bahwa antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang aspek pertanggungjawaban keuangan tahunan kepada publik, hal ini bisa disebabkan kurangnya pembahasan dalam rapat pleno komite tentang laporan keuangan sekolah dan tidak adanya waktu bagi komite sekolah untuk mengadakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Mengenai aspek ke empat yaitu laporan investigatif *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 3,3742 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 3,0000. Karena hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,022 < 0,05$, maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang laporan investigatif.

Hasil ini memberikan makna bahwa antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terdapat perbedaan persepsi tentang laporan investigatif, hal ini bisa disebabkan masih adanya pengaduan dari masyarakat yang belum mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak sekolah.

Selanjutnya tentang aspek yang kelima yaitu tingkat akuntabilitas secara keseluruhan *stakeholder* internal mendapat rata-rata nilai sebesar 3,5484 lebih tinggi daripada rata-rata nilai yang didapatkan *stakeholder* eksternal sebesar 3,3158. Hasil uji statistik didapatkan nilai p sebesar $0,054 > 0,05$ maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata nilai yang diperoleh *stakeholder* internal dengan *stakeholder* eksternal tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil uji statistik tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan memberikan arti bahwa antara *stakeholder* internal dan eksternal terdapat kesamaan persepsi tentang tingkat akuntabilitas secara keseluruhan, hal ini bisa disebabkan karena secara keseluruhan pengelolaan keuangan sekolah telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan dan Implikasi

5.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Bahwa antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional di Kabupaten Kendal.
- 2). Bahwa antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional di Kabupaten Kendal.
- 3). Penyebab adanya perbedaan persepsi antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal terhadap pengelolaan keuangan sekolah adalah bahwa *stakeholder* internal sudah terlibat sejak sekolah membuat perencanaan, melaksanakan anggaran dan pembuatan laporan keuangannya, sedangkan *stakeholder* eksternal tidak terlibat sebagaimana *stakeholder* internal.

5.1.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas dalam bab IV juga, maka terdapat implikasi yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Adapun bentuk implikasi itu adalah bahwa sekolah di dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yaitu mulai perencanaan,

pelaksanaan anggaran dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholder*.

Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* internal sekolah dalam penyusunan perencanaan, melaksanakan anggaran sesuai perencanaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti kuitansi yang sah. Selanjutnya sekolah memberikan laporan kepada publik secara periodik tentang pengelolaan keuangan sekolah sehingga publik bisa memberikan fungsi kontrolnya apabila ada penyimpangan dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Peneliti mengakui sekalipun sudah berupaya semaksimal dan sebaik mungkin dalam melakukan penelitian ini, namun masih ditemui adanya keterbatasan- keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan antara lain :

- 1). Sedikitnya sekolah yang dijadikan sebagai populasi penelitian yaitu hanya lima SMP Negeri yang berstandar nasional, padahal pada sisi yang lain jumlah sekolah khususnya SMP Negeri di Kabupaten Kendal jumlahnya mencapai 40 sekolah lebih, dimana sekolah-sekolah tersebut juga sangat diperlukan informasinya tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolahnya.
- 2). *Stakeholder* internal maupun eksternal dalam penelitian ini masih terbatas pada guru, karyawan dan komite sekolah untuk internal dan Peneliti APBS Dinas,

dewan pendidikan dan LSM peduli pendidikan untuk eksternal, padahal masih ada *stakeholder* yang lain yaitu siswa untuk *stakeholder* internal dan mungkin wartawan/pers untuk *stakeholder* eksternal yang mewakili publik.

5.2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini peneliti memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut :

- 1). Untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sekolah yang dijadikan sebagai populasi penelitian meliputi semua sekolah negeri yang ada bahkan sampai ke sekolah swasta.
- 2). Untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan *stakeholder* (internal maupun eksternal) yang lebih banyak misalnya dengan menambah siswa dan wartawan/pers yang dijadikan respondennya.
- 3). Untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengetahui mengapa ada perbedaan persepsi antara *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan faktor apa yang menjadi penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyikin.Jumirin. Tesis, *Persepsi Kepala Instansi Pemerintah Terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja*, UGM. 2001
- Bastian. Indra , 2007, *Akuntansi Pendidikan* ,Penerbit Erlangga,Jakarta
- Bastian. Indra ,2007, *Manajemen Keuangan Sekolah Sebagai Basis Kualitas Pendidikan, Konferensi Guru Indonesia*
- Bastian. Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga,Jakarta*
- Bimo. W, *Pengantar Psikologi Umum*, 1993, Andi Offset
- Budiardjo,Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung, Mizan
- Bungin,Burhan,*Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2004. Edisi Pertama Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Code of Good Practices on Fiscal Transparanc, IMF, 2001, Edisi Revisi 23 Maret 2001, www.imf.org
- Darma.Surya . *Manajemen Keuangan sekolah*, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, 2007
- Gibson,James,L.Ivancevick,John M Donnely, James H.1987. Organisasi : *Perilaku, Struktur dan Proses* (Terjemahan). Edisi kelima, Jakarta. Erl;angga.
- Gozali.Imam. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 2006, BP Undip Semarang
- Haryanto,*Akuntansi Sektor Publik*, 2007. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Irwanto, Dkk. 1997, *Psikologi Umum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Jalal,F dan Supriyadi,D.2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* ,Yogyakarta;Adicita Karya Nusa
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,1995
- KepMendagri No. 29 Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, 2002

Keputusan Kepala LAN Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketetapan MPR RI No XV / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kotler, Philip. 2000. *Marketing, manajemen : Analisis, Planing, Implementation and Control*, 9 Th. Prentice Hall International Int, New Jersey.

Logos. *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*, 2003

Lolina Lalolo Krina P, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2004, Penerbit Andi

Mardiasmo. "Otonomi Daerah sebagai upaya memperkokoh Perekonomian Daerah", *Jurnal Ekonomi Rakyat* Th I No. 4, Juni 2002

Meuthia Ganie, Rochman, 2000, Artikel Judul : *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*, dimuat dalam Buku HAM : Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta, Komnas HAM

Muhammad. Hamid, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2007

Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Nasir. M .2005, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Permendiknas Nomor 44 Tahun 2003, *Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*

PP No 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, 2000

Robbins. Stephen P, 2006, *Perilaku Organisasi*, PT INDEXKS Kelompok GRAMEDIA

Safwirdi. Tesis. *Analisis, Pelaporan Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi Akuntabilitas Publik dan Good Governance (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta)*, UGM. 2005

Santoso. Puji B, Tesis, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembiayaan dan efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Kabupaten Banyumas*, UGM, 2005

Siegel, Gary And Helene Rumanuskas Marconi, 1989. *Behavioural Accounting*, South Western Publishing Co, Ohio.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2007, Alfabeta Bandung

Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*, 2006, Alfabeta

Suharto, Edi. 2005 : *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembengunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Refika Aditama

Suryana. Deden, *Manajemen Keuangan Sekolah*, Oktober 2008

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*

Walgito, B., 2001, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM

Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

